

REGIONALISME ASEAN DALAM MERESPONS PANDEMIK COVID-19

Ziyad Falahi dan Poltak Partogi Nainggolan

Abstrak

Pandemik Covid-19 menyebar secara cepat dan menyebabkan kematian yang hebat di berbagai belahan dunia. Berbagai negara di kawasan, terutama ASEAN, tidak siap dalam menghadapi wabah penyakit yang disebabkan virus Corona varian terbaru ini. Regionalisme menjadi salah satu solusi untuk meresponsnya, termasuk dengan menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD), seperti masker, sarung tangan, dan hand sanitizer. Negara anggota ASEAN yang tengah fokus dan sibuk dengan target pertumbuhan ekonomi mereka masing-masing, terdampak hebat oleh penyebaran dan serangan pandemik Covid-19. Kajian singkat ini membahas bagaimana negara anggota ASEAN merespons ancaman keamanan yang datang dari penyebaran pandemik ini secara sendiri-sendiri dan dalam perspektif regionalisme, yang berdiri di atas tiga pilar politik-keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya. Sejauh mana tingkat kohesivitas yang telah terbentuk dapat dilihat sebagai parameter tingkat pelembagaan regionalisme yang ada.

Pendahuluan

Sejak wabah penyakit (pandemik) Covid-19 melanda Kota Wuhan dan menyebar ke luar wilayah China, ia menjadi salah satu ancaman keamanan nontradisional yang signifikan di wilayah Asia Tenggara. Untuk merespons itu, baik China sebagai sumber munculnya pandemik maupun negara-negara di kawasan yang tergabung dalam masyarakat ASEAN, memutuskan sikap dan kebijakan masing-masing. Kebijakan nasional mereka ada yang bersifat toleransi

dan kooperatif, serta saling mendukung, tetapi ada pula yang tampak lebih menunjukkan egoisme dan kepentingan nasional. Mengingat terdapat saling pengaruh, apapun kebijakan yang diambil akan menentukan gagal atau suksesnya upaya mengatasi pandemik secara efektif di kawasan dan di tingkat global.

Salah satu kebijakan yang diputuskan langsung negara anggota ASEAN ketika pandemik Covid-19 mewabah adalah dengan mendorong penutupan teritori yang merupakan kedaulatan

nasional mereka, baik di darat, laut, maupun udara. Kebijakan yang disebut *lockdown* ini ada yang diterapkan secara luas ataupun bertahap dan terbatas, dengan memberikan toleransi terhadap beberapa aktivitas masyarakat yang vital, seperti berbelanja kebutuhan pokok. Kebijakan *lockdown* yang bersifat semi-karantina dikhawatirkan dapat memengaruhi implementasi regionalisme ASEAN yang telah mencanangkan diri mereka sebagai komunitas kawasan pada tahun 2015.

Di luar ASEAN, eksistensi dan peran kekuatan eksternal berlangsung secara dinamis. Sementara itu, ASEAN terus memperkuat proses institusionalisasi dirinya dengan melanjutkan berbagai konferensi tingkat menteri sebagai bagian penting dalam merekatkan hubungan mereka. Merebaknya secara cepat dan ganas pandemik Covid-19 akan menimbulkan implikasi pada praktik regionalisme ASEAN. Sejauh mana dinamikanya perlu dibahas dalam kajian singkat ini, karena akan berpengaruh terhadap prospek regionalisme tersebut. Kajian ini juga mengungkap respons yang diambil negara anggota ASEAN untuk melihat negara manakah yang tampak kooperatif, kontradiktif, kontroversial ataupun kondusif dengan upaya global dalam memerangi penyebaran pandemik Covid-19.

Memahami Regionalisme dan Pandemi

Partisipasi masyarakat menjadi instrumen untuk mengukur tingkat

integrasi dan disintegrasi suatu wilayah. Mansfield dan Milner (2019: 589-627.) menjelaskan bahwa integrasi dapat berlangsung di antara wilayah yang bersifat komplementer. Sebagai contoh Uni Eropa (UE) yang memiliki sejarah interaksi yang lama sebelum terintegrasi melalui semangat kerja sama ekonomi. Namun, masyarakat turut menentukan perkembangan dinamika ekonomi yang berkembang di kawasan, sehingga selama kebijakan *lockdown* di tingkat kawasan tidak berlangsung dalam waktu lama, atau selamanya, eksistensi dan perkembangan tiga pilar ASEAN tidak terlalu terpengaruh.

Resistensi terhadap kebijakan *lockdown* di beberapa negara, termasuk di bandara dan pelabuhan laut, adalah indikasi bahwa negara di kawasan belum ingin mengabaikan pentingnya regionalisme. Kemudian, sinergisitas dengan mengedepankan paradigma pembangunan yang inklusif merefleksikan betapa negara anggota ASEAN ingin menyelamatkan kerja sama regional mereka. Peningkatan interaksi sosial dan kerja sama akan memperkuat integrasi di Asia Tenggara. Selain peran pemerintah, peran masyarakat yang dominan dalam pembangunan dibutuhkan untuk menjaga integrasi regional (Bahagijo, dkk, 2019).

Kebijakan *lockdown*, yang diputuskan secara tegas oleh Singapura sejak dini, telah diikuti oleh Filipina dan Malaysia,

serta Indonesia belakangan secara lamban, sehingga menyumbang pada disrupsi di sektor perindustrian. Dalam beberapa dasawarsa, sejak dekade 1970, Asia Tenggara merupakan tujuan pasar ekspor komoditi migas dan non-migas yang besar bagi sesama negara anggota ASEAN dan kekuatan regional besar seperti China. Dengan terdampaknya sektor ekonomi akibat kontaminasi pandemik Covid-19, perdagangan internasional China turun 11,6% pada Januari dan Februari 2020, dengan angka ekspor jasa pariwisata menurun 23,1%. Bank Dunia telah mengingatkan, dalam skenario terbaik sekalipun, perkembangan ekonomi di kawasan dapat mengalami penurunan drastis. Ekspansi perekonomian China sendiri telah mengalami pelambatan menjadi 2,3% dari 6,1% pada 2019 (Koran Tempo, 1 April 2020).

Menjelang dan pada saat merebaknya serangan pandemik Covid-19, rivalitas dan upaya saling rebut pengaruh antara dua adidaya di kawasan, yakni AS dan RRC, tetap berlangsung. Sebagai contoh, pada bulan November 2019 Pemerintah AS tidak mendapat undangan pertemuan puncak ASEAN di Bangkok, karena AS hanya ingin mengirimkan delegasi setingkat menteri (Menlu Mike Pompeo). Hal tersebut berimplikasi terhadap tidak terselenggaranya KTT ASEAN-AS yang telah diusulkan Trump untuk digelar di Las Vegas pada Maret 2020. Sementara pemerintah AS selama ini telah mengampanyekan

“*Buy American Product*” di Asia Tenggara. Sikap AS yang kontra-produktif membuat Pemerintah Filipina yang selama ini menjadi mitra dekatnya semakin menjauh, yang terlihat jelas ketika China gencar meluncurkan diplomasi masker untuk membantu ASEAN memerangi pandemik Covid-19. Sedangkan Thailand masih ingin menyeimbangkan kerja sama dengan kedua negara adidaya (Republika, 31 Maret 2020).

China dan Diplomasi Masker di ASEAN

China sebagai kekuatan pengganti eksistensi dan peran negara adidaya lama, AS, pasca-ketegangan yang tercipta akibat kebijakan dan manuvernya di Laut Cina Selatan, sejak Januari 2020 mulai menunjukkan sikap ramah sebagai bentuk rekonsiliasinya, dengan negara-negara di kawasan, terutama anggota ASEAN. Pasca-merebaknya pandemik Covid-19, Pemerintah China dengan cepat telah menawarkan bantuan peralatan medis dan alat pelindung diri (APD) kepada negara-negara di Asia Tenggara. Begitu pula aktor non-negara mereka, seperti Jack Ma, pemilik perusahaan transnasional yang sangat disegani di China telah bergerak menawarkan bantuan dengan inisiatif *corporate social responsibility* yang dilakukan sejumlah perusahaan mereka.

Inisiatif dan langkah yang diambil China dengan ‘diplomasi masker’ ini dimaknai sebagai sarana *re-branding* pemerintahnya dalam memelihara dan menjaga kontinuitas hubungan regionalnya

dengan ASEAN, terutama dalam hubungannya dengan kerja sama ekonomi. Dalam beberapa minggu terakhir ketika kontaminasi virus Corona menghebat di kawasan Asia Tenggara, para aktor negara dan non-negara China secara agresif menawarkan bantuan kemanusiaan, yang paling mencolok adalah pengiriman APD. Langkah diplomasi kemanusiaan itu tidak bisa dinilai kecil karena berbagai negara di dunia, bahkan negara besar seperti AS, dan UE sekalipun, menghadapi kelangkaan APD tatkala pandemik tengah meluas.

Perkembangan yang menggembirakan tampak terjadi di dalam negeri China, yang memperlihatkan aktivitas pabrik mulai menggeliat di akhir Maret 2020. Kondisi baru ini akan memberikan peluang bagi Pemerintah China untuk dapat memberikan bantuan kemanusiaan yang lebih besar kepada negara anggota ASEAN, mitranya di kawasan, dalam memerangi dan menanggulangi dampak pandemik Covid-19. Dengan demikian, diplomasi masker diharapkan dapat meningkat ke arah yang lebih tinggi dan luas ke sektor-sektor lain yang terdampak langsung.

Regionalisme dalam Merespons Ancaman Bersama

Kebijakan *lockdown* dalam menghadapi pandemik Covid-19 dilakukan secara ketat di Kota Wuhan, China, dengan kontrol aparat keamanan yang keras. Kebijakan ini menjadi bumerang bagi China, karena ditiru atau

diikuti oleh negara anggota ASEAN seperti Singapura, Filipina dan Malaysia, mengingat hasilnya yang efektif. Patut dicatat, kebijakan ini tidak bersifat permanen dan terbatas, tidak berlaku untuk seluruh wilayah China yang luas, kecuali Wuhan dan terbatas di sebagian Provinsi Hubei saja. Hal serupa terjadi di beberapa negara ASEAN. Jadi, kebijakan ini tidak akan menghapus regionalisme kawasan dan hubungannya dengan China, selain hanya untuk waktu beberapa bulan saja. Sebab, secara realistis, aktor negara dan non-negara China berperan aktif dalam membantu ASEAN dengan diplomasi kemanusiaan dan maskernya.

Keputusan sepihak Singapura, Filipina, dan Malaysia menutup bandara untuk turis China juga tidak bisa dimaknai sebagai sikap yang tidak memperlihatkan solidaritas atas China yang tengah diterpa bencana. Solusi yang diambil lebih bersifat pertimbangan medis, bukan politis. Ini berbeda dengan langkah yang diambil Kamboja, Laos, dan Myanmar yang tidak melakukan *lockdown*. Mereka memang sangat bergantung pada bantuan luar negeri China, khususnya ekonomi, di samping masih menghadapi dampak pandemik yang minim. Sedangkan sikap Indonesia yang tidak langsung memulangkan turis China, terutama dari Bali, bersifat kemanusiaan semata.

Kebijakan yang bervariasi di lingkungan ASEAN juga tampak di UE. Keputusan yang diambil sifatnya reaktif, karena

negara-negara di kawasan Asia Tenggara maupun Eropa tidak siap dalam merespons serangan virus Corona. Presiden AS, yang semula mengolok-olok China yang tengah dilanda bencana Covid-19, kini berbalik memohon ke China, untuk memperoleh kebutuhan mendesak atas masker dan ventilator, setelah korban tewas jauh lebih banyak. Dengan merebaknya pandemik Covid-19, regionalisme ASEAN mendapat tantangan dan dipertanyakan eksistensinya. Komitmen negara anggota dan pengaruh ancaman dari luar, khususnya isu ancaman keamanan non-tradisional pandemik Covid-19 ini, muncul sebagai faktor yang memengaruhi perkembangan regionalisme di kawasan. Hal ini dapat dipahami mengingat tinggi dan cepatnya tingkat mobilitas dan pergerakan penduduk di era globalisasi.

Penutup

Sikap negara anggota ASEAN atas China ketika pandemik Covid-19 baru saja merebak di Kota Wuhan, tampak terpecah antara yang menunjukkan empati dan solidaritas tinggi dengan yang masih membuka diri terhadap China dan dalam posisi melihat dan menunggu perkembangan (*wait and see*). Sebaliknya, tawaran bantuan China, baik dari aktor negara (pemerintah) maupun non-negara terhadap kebutuhan pengadaan APD di negara anggota ASEAN merupakan salah satu indikator kepedulian negara adidaya baru untuk menunjukkan peran dan pengaruhnya secara signifikan di kawasan.

Uluran tangan padai saat genting dari China sangat dirasakan tepat dan besar manfaatnya bagi pemerintah dan rakyat di masing-masing negara anggota ASEAN. Secara realistis tampak bahwa tawaran bantuan China dan diplomasi APD, terutama masker dan ventilator, menjadi berguna dalam mendukung terbangunnya hubungan yang harmonis dan kuat antara China dan ASEAN sebagai masyarakat kawasan, tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga politik-keamanan dan sosial-budaya.

Secara khusus juga tampak bahwa Covid-19 merupakan isu ancaman keamanan non-tradisional, yang implikasinya tidak sebatas masalah kesehatan. Juga terungkap, dengan adanya serangan pandemik, muncul dilema keamanan baru di kawasan pada era pasca-Perang Dingin. Isu kedaulatan nasional masih kuat dan tidak dapat dikatakan telah menipis, sehingga diplomasi tetap penting eksistensi dan perannya dalam mendorong ASEAN untuk membentuk, memperbaiki, dan menyusun kembali kerangka kerja samanya.

Referensi

- Agung, Vazza P, "Rivalitas Superpower di Asia Tenggara", *Republika*, 31 Maret 2020, hal. 14.
- Bahagijo, Sugeng, Hamong Santono, dan Meina Oktiasari. 2019. *Panduan Kemitraan Multipihak bagi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Mansfield Edward. D. dan Helen. V. Milner, "The New Wave of Regionalism." *International Organization*, Vol. 53, 3 Summer, 2019, hal. 589-627.

Nainggolan, Poltak Partogi, "Wabah Corona dan Keamanan Nasional," *Koran Tempo*, 18 Maret 2020, hal. 9.
"Pandemik di Asia Belum selesai", *Koran Tempo*, 1 April 2020, hal. 8.



Ziyad Falahi
ziyad.falahi@dpr.go.id



Poltak Partogi Nainggolan
partogi.nainggolan@dpr.go.id

Ziyad Falahi, M.Si., menyelesaikan pendidikan S-1 Hubungan Internasional Universitas Airlangga pada tahun 2010. Lulus S-2 Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia pada 2012. Peneliti Pertama bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Penulis dapat dihubungi melalui email: ziyad.falahi@dpr.go.id.

Prof. Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A., Peneliti Utama Masalah-masalah Hubungan Internasional dan Domestik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPRRI. Menulis sejumlah buku dan artikel di berbagai jurnal ilmiah dan media. Penulis dapat dihubungi melalui email: partogi.nainggolan@dpr.go.id.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.